

Program Makan Bergizi Gratis: Skematisasi *Maslahah Mursalah* Dalam Peningkatan Perekonomian Lokal Desa Bumiharjo Batanghari

Putri Rahma Sari

Zumaroh

Suraya Murcitaningrum

Alfiansyah Imanda Putra

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo lampung

Email: putriramasari955@gmail.com

Abstract:

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy aimed at improving the nutritional quality of the community while simultaneously potentially encouraging sustainable local economic growth. This study aims to analyze the implementation of the MBG program in improving the local economy based on the perspective of *masalah mursalah* at the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) in Bumiharjo Village, Batanghari District. This study uses a qualitative approach through a case study. Data were obtained through in-depth interviews, field observations, and documentation involving the head of the SPPG, field assistants, and MSMEs as food suppliers. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing. The results show that the implementation of the MBG program involved 12 local MSMEs as food suppliers, thereby creating economic circulation, opening business opportunities, and increasing the income of MSMEs. From the perspective of *masalah mursalah*, this program reflects *masalah* in the aspect of *hifz al-mal* (protecting wealth) because it is able to encourage productive economic activities and improve community welfare in a more equitable and sustainable manner.

Keywords: *Free Nutritious Meals, Masalah Mursalah, Local Economy, MSMEs.*

Abstrak:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus berpotensi mendorong pertumbuhan perekonomian lokal secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program MBG dalam meningkatkan perekonomian lokal berdasarkan perspektif *masalah mursalah* pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi yang melibatkan kepala SPPG, asisten lapangan SPPG, dan pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG melibatkan 12 UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan sehingga menciptakan perputaran ekonomi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Dalam perspektif *masalah mursalah*, program ini mencerminkan *masalah* pada aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) karena mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Makan Bergizi Gratis, Masalah Mursalah, Perekonomian Lokal, UMKM*

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan strategis pemerintah dalam upaya mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwasanya negara bertanggung jawab atas ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi (Waluyo, 2025). Selain itu program ini juga relevan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menempatkan perbaikan gizi sebagai bagian penting dalam pembangunan kesehatan nasional. (Sofyan & Yusuf, 2024).

Data UMKM Pemasok Bahan Pangan SPPG Desa Bumiharjo

No	Nama UMKM	Alamat	Supply
1.	Sanjaya	Desa Bumiharjo, Batanghari	Daging Ayam
2.	Jafar Eko	Desa Bumiharjo, Batanghari	Buah dan sayuran
3.	Wiwik	Desa Bumiharjo, Batanghari	Telur Puyuh
4.	Siti Mustiyah	Desa Bumiharjo, Batanghari	Kue Basah
5.	Nailul Hanifah	Desa Bumiharjo, Batanghari	Buah
6.	Arya	Desa Bumiharjo, Batanghari	Telur Ayam
7.	BUMdesa Berkah	Desa Banjarejo, Batanghari	Gas, Angkutan
8.	Jaya	Desa Banjarejo, Batanghari	Sampah
9.	Ngari	Desa Banjarejo, Batanghari	Tahu
10.	Rizal	Desa Banjarejo, Batanghari	Telur Ayam
11.	Anjar Pratomo	Karangrejo, Metro Utara	Beras
12.	Budi	Desa Kali Bening, Pekalongan	Tempe
	Atan Hasan		Daging Sapi

Tabel data UMKM pemasok bahan pangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG di SPPG Desa Bumiharjo melibatkan berbagai pelaku usaha lokal dengan jenis komoditas yang beragam. Setiap UMKM memiliki peran spesifik dalam menyuplai kebutuhan bahan pangan, mulai dari bahan utama seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur, hingga bahan pelengkap seperti sayuran, buah, tempe, tahu, serta produk olahan seperti kue basah. Keberagaman jenis komoditas ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya bekerja sama pada satu sektor usaha.

Dalam penelitian ini, pelaku usaha yang terlibat sebagai pemasok bahan pangan dalam program MBG merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang berasal dari Desa Bumiharjo dan wilayah sekitarnya. Berdasarkan observasi awal diperoleh data pemasok bahan pangan, yaitu terdapat 12 UMKM lokal yang berperan sebagai pemasok bahan pangan dalam pelaksanaan program MBG yang dilaksanakan di SPPG Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari. Dilihat dari data tersebut terdapat 6 UMKM lokal yang berasal dari Desa Bumiharjo, selain Desa Bumiharjo, SPPG Desa Bumiharjo juga bekerja sama dengan luar desa, yaitu terdapat 4 UMKM lokal berasal dari Desa Banjarejo, 1 UMKM lokal dari Karangrejo, Metro Utara, dan 1 UMKM lokal dari Kali Bening, Pekalongan.

Secara geografis, Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur berkontribusi di sektor pertanian sebagai penghasil beras (Bumiharjo, 2024), dengan luas wilayah sekitar 453,34 Ha. Rata-rata dari luas lahan yang dikerjakan oleh petani di desa bumiharjo ialah 0,26 hektar per petani. Selain pertanian penghasil ekonomi desa juga didapat dari usaha seperti peternakan ayam petelur, perdagangan bahan pangan, serta UMKM lokal, kuliner dan sembako. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada pemasukan beras tidak di peroleh dari desa bumiharjo melainkan dari luar desa yaitu desa banjarejo. Hal ini sangat menarik untuk diteliti. Menurut Bapak DK selaku Asisten Lapangan SPPG, Ia menyampaikan bahwa:

“Pengilingan pabrik di banjarejo memiliki kapasitas lebih besar, dan siap menjadi mitra tetap penyedia beras harian SPPG Bumiharjo (DK,2026)”.

Hasil wawancara dengan UMKM lokal sebagai pemasok beras yang bekerja sama dengan SPPG Desa Bumiharjo, bahwasanya sebelum bekerja sama dengan SPPG penjualan beras hanya dipasarkan kepada pedagang pasar dan masyarakat sekitar sehingga jumlah permintaan yang diperoleh masih terbatas dengan omzet diperkirakan sekitar Rp.1.250.000 - Rp.1.500.000/transaksi. Namun setelah menjadi pemasok tetap SPPG dalam program MBG, omzet mencapai sekitar Rp. 3.114.000/transaksi. Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan konsep *masalah mursalah*, yaitu kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Yanti, 2025.). Dalam konteks ini, peningkatan perputaran ekonomi dan pendapatan UMKM lokal juga mencerminkan upaya menjaga keberlangsungan harta (*Hifz al-Mal*) dalam kehidupan.

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap perekonomian lokal. Penelitian oleh (Raihan et al., 2026) memperlihatkan bahwasanya MBG mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan komoditas pertanian, keterlibatan UMKM, serta terciptanya efek pengganda ekonomi di masyarakat. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Yosef et al., 2025) dan (Yuni, 2025) yang menegaskan bahwa program MBG berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan rantai pasok pangan lokal. Selain itu, penelitian (Mursalin et al., 2026) dan (Basit & Ramadani, 2025) memperlihatkan bahwa MBG dapat menjadi instrumen pembangunan perekonomian lokal melalui peningkatan permintaan bahan pangan serta keterlibatan bidang pertanian serta pelaku usaha kecil.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih meninjau program MBG dari perspektif ekonomi pembangunan dan kebijakan publik. Kajian yang menganalisis program MBG dalam perspektif ekonomi islam, khususnya melalui pendekatan *masalah mursalah*, masih cukup terbatas. Lebih dari itu, penelitian yang mengkaji implementasi program MBG secara empiris pada tingkat lokal melalui unit pelaksana seperti SPPG juga belum banyak dilakukan, terutama dalam melihat bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *masalah mursalah* (*haqiqiq, ammah*, dan kesesuaian syariah) untuk menganalisis implementasi program MBG dalam meningkatkan perekonomian lokal. Penelitian ini juga menghadirkan kajian empiris pada tingkat lokal melalui studi pada SPPG di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari, sehingga memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai bagaimana program MBG berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta mencerminkan kemaslahatan ekonomi dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), menganalisis dampak program MBG terhadap peningkatan perekonomian lokal masyarakat, dan menganalisis implementasi program MBG dalam perspektif *masalah mursalah*, khususnya pada aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari.

TINJAUAN PUSTAKA

Masalah Mursalah

Secara umum, *masalah mursalah* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan sebagai: segala sesuatu yang

mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. Menurut (Al-Ghazali, 2008) menyimpulkan, *masalah mursalah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara. Adapun lima ranah tujuan, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*) upaya memastikan keberlangsungan keyakinan dan praktik keagamaan agar manusia dapat menjalankan ajaran agamanya secara aman dan layak, menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) yang bertujuan melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari segala bentuk ancaman, menjaga akal (*hifz al-'aql*) yaitu menjaga fungsi intelektual manusia agar tetap sehat dan berkembang, menjaga keturunan (*hifz an-nasb*) yang berkaitan dengan keberlangsungan generasi yang sehat, bermartabat, dan berkualitas melalui perlindungan tumbuh kembang anak dan keluarga, menjaga harta (*hifz al-mal*) yaitu upaya melindungi, mengelola, dan mengembangkan harta secara adil dan produktif untuk menunjang kesejahteraan individu maupun masyarakat. Lengkapnya beliau mengatakan, “pada dasarnya, *masalah mursalah* adalah suatu ungkapan tentang meraih kemanfaatan dan menolak bahaya (*mudharat*), dimana hal ini sebenarnya menjadi tujuan semua makhluk hidup. Maka *masalah mursalah*, adalah menjaga atau memelihara maksud-maksud syara dari tujuan makhluk.

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada aspek menjaga harta (*hifz al-mal*), karena paling relevan dengan objek penelitian, yaitu keterlibatan pelaku perekonomian lokal untuk melaksanakan program MBG melalui SPPG Desa Bumiharjo. Keterlibatan petani, pemasok bahan pangan, dan pelaku UMKM dalam program tersebut mendorong perputaran ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut (Miswanto, 2018) *masalah mursalah* merupakan sumber hukum sekunder yang dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Berkaitan dengan perihal ini, pendekatan *masalah mursalah* digunakan untuk menganalisis program MBG yang meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun memiliki tujuan memberikan kemaslahatan melalui pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran perekonomian lokal.

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tidak semua bentuk kemaslahatan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Suatu *masalah mursalah* harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diterima secara syar'i. Salah satu kriteria utama, *masalah mursalah* tersebut harus bersifat nyata (*haqiqi*), yaitu manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan bukan sekedar dugaan atau asumsi semata. Dengan demikian, penetapan hukum berdasarkan *masalah mursalah* tidak boleh didasarkan pada spekulasi, melainkan harus memiliki dasar empiris yang jelas.

Kriteria selanjutnya dalam *masalah mursalah* yang dapat dijadikan hukum harus bersifat umum (*ammah*), yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan yang bersifat umum menunjukkan bahwa tujuan hukum islam adalah menciptakan kesejahteraan kolektif dan menjaga kepentingan publik. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau program dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* apabila dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan umum.

Selanjutnya, selain bersifat *haqiqi* dan *ammah*, kriteria lainnya, *masalah mursalah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam. Artinya, meskipun suatu kebijakan dianggap membawa manfaat, apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, atau nilai-nilai dasar islam, maka tidak dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* yang sah. Dengan demikian, *masalah mursalah* harus tetap berada dalam koridor syariat dan tidak menyimpang dari tujuan utama hukum islam. Maka dari itu, ketiga kriteria ini menjadi landasan penting dalam menilai suatu kebijakan atau program, termasuk dalam menganalisis implementasi program sosial-ekonomi dalam perspektif hukum islam (Abdussalam & Abdullah, 2022).

Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ialah salah satu bentuk program sosial yang diterapkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama peserta didik, sekaligus memperluas pemerataan akses gizi yang layak. MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program MBG adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil (Kiftiyah et al., 2025).

Dalam Buku Pedoman MBG di Satuan Pendidikan (Pendidikan, 2024) MBG didefinisikan atas program penyediaan makanan sehat yang disusun berdasarkan kebutuhan gizi seimbang, untuk dibagikan secara gratis dan rutin kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.

Dalam buku Kajian Program MBG (Yadiman, 2025) dijelaskan sebagai model pemberian makanan sehat yang dirancang memperhatikan kearifan lokal, potensi ekonomi desa, serta ketersediaan pangan wilayah. Artinya, MBG tidak sekadar membagikan makanan gratis, tetapi memanfaatkan bahan pangan lokal agar perputaran ekonomi daerah tetap hidup dan masyarakat memperoleh manfaat ganda. Sejumlah penelitian mendukung definisi tersebut (Mowilos et al., 2025) memandang MBG sebagai peran jangka panjang yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga keberlangsungan pemberdayaan usaha lokal. Penelitian (Raihan et al., 2026) juga menjelaskan bahwa implementasi program MBG mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat at melauli peningkatan permintaan bahan pangan dan keterlibatan UMKM lokal.

Dalam konteks penelitian ini, MBG di Desa Bumiharjo pada SPPG dipahami sebagai upaya mendistribusikan makanan sehat kepada masyarakat sekaligus mendorong perputaran perekonomian lokal melalui kerja sama dengan petani dan UMKM sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Perekonomian Lokal

Perekonomian lokal merujuk pada seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlangsung dalam lingkup geografis tertentu, biasanya pada skala desa, kecamatan, atau daerah kabupaten. Aktivitas ekonomi ini tumbuh dari potensi lokal seperti sumber daya alam, tenaga kerja setempat, keterampilan masyarakat, dan jaringan usaha desa. Perekonomian lokal merupakan sistem ekonomi berbasis komunitas yang berkembang melalui interaksi sosial, pemanfaatan sumber daya lokal, dan partisipasi warga dalam menciptakan nilai ekonomi (Afdhal, 2023). Dalam konteks tersebut, ekonomi lokal bukan sekedar dilaksanakan penilaian dari transaksi jual beli, melainkan turut dari sisi pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Di desa, perekonomian lokal sering kali diwujudkan melalui pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, dan usaha kecil. Aktivitas ekonomi lokal bersifat dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga penguatan ekonomi desa sangat menentukan stabilitas sosial dan kesejahteraan warganya. Dengan demikian, dalam penelitian ini perekonomian lokal mencakup seluruh aktivitas ekonomi desa bumiharjo yang bekerja sama melalui petani, UMKM lokal yang terlibat dalam pemasok bahan pangan untuk program MBG.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menciptakan data deskriptif mencakup sejumlah kata, baik yang tertulis ataupun lisan, dari subjek yang diteliti serta dari tindakan yang diobservasi. Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk memahami

peristiwa sosial secara mendalam, seperti persepsi, sikap, motivasi, dan tindakan, dalam kondisi yang alami dengan menggunakan berbagai metode (Sugiyono, 2019). Pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami dengan mendetail akan pelaksanaan program MBG serta dampaknya terhadap ekonomi lokal masyarakat Desa Bumiharjo melalui perspektif *maslahah mursalah*. Pemilihan SPPG di Desa Bumiharjo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada data empiris keterlibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan program MBG, yang memperlihatkan adanya kerjasama antara masyarakat setempat. Dari data pemasok bahan baku terdapat 12 UMKM, dengan berbagai bahan supply seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging ayam dan sapi, telur, tahu, tempe, serta roti. Keterlibatan masyarakat sekitar untuk dijadikan supply membuktikan adanya perputaran ekonomi desa yang nyata serta terbukanya akses pasar berkelanjutan bagi usaha, sehingga pelaksanaan MBG bukan sekedar berorientasi akan tercukupinya gizi, melainkan menjaga harta (*hifz al-mal*) secara langsung. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini difokuskan pada satu unit analisis, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bumiharjo, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait penerapan program MBG, keterlibatan UMKM lokal, serta relevansinya dengan prinsip kemaslahatan. Pendekatan tersebut memungkinkan bagi peneliti untuk menggali data secara mendalam serta kontekstual, yang nantinya bisa menghasilkan analisis yang utuh serta bermakna sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun data yang dipakai pada penelitian ini ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama atau informan melalui kegiatan wawancara, yang bertujuan untuk memperkuat keabsahan data. Dalam hal ini, informan dianggap sebagai sumber utama data penelitian. Yang berperan sebagai sumber data primer pada penelitian ini ialah kepala SPPG Bumiharjo, Asisten Lapangan SPPG Bumiharjo, serta UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan yang terkait pada pelaksanaan program MBG. Dalam penentuan informan, peneliti memanfaatkan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel melalui sejumlah pertimbangan serta karakteristik khusus yang selaras dengan tujuan penelitian, sehingga informan yang dipilih benar-benar merupakan pihak yang memahami dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, sumber data sekunder adalah informasi yang didapatkan tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui perantara atau pihak ketiga. Sumber data sekunder pada penelitian ini mencakup SPK pengadaan barang serta bahan baku, SOP pengaturan distribusi bahan baku, Struktur Organisasi SPPG Bumiharjo, Pengadaan bahan pangan SPPG.

Teknik pengumpulan data menjadi tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan penelitian, sebab inti dari aktivitas ini ialah mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mengumpulkan data dengan langsung di lokasi penelitian. Berikut cara pengumpulan data yang dimanfaatkan meliputi Wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui dialog langsung antara peneliti serta narasumber, dalam hal ini terdiri dari kepala SSPG, asisten lapangan SPPG dan pemasok bahan pangan seperti UMKM lokal. Metode ini mempunyai tujuan mencari informasi dengan lebih mendetail berhubungan dengan persoalan yang dikaji. Meskipun terdapat kendala seperti sikap yang tertutup dari responden, khususnya ketika membahas pengalaman spiritual, peneliti yakin bahwasanya dengan membangun komunikasi yang nyaman dan terbuka, para informan akan lebih bersedia untuk berbagi informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, Pengamatan (Obrsevasi), merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara memperhatikan langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini melibatkan penggunaan seluruh indra seperti mata, telinga, bahkan intuisi. Peneliti melakukan pengamatan langsung di SPPG Desa Bumiharjo untuk mengamati proses pelaksanaan program MBG serta dampaknya pada aktivitas perekonomian lokal. Selanjutnya, Dokumentasi ialah cara yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data melalui

dokumen atau arsip tertulis. Teknik ini bertujuan memperoleh informasi yang tercatat dalam, seperti catatan, transkrip, buku, artikel, dan sebagainya. Sumber dokumentasi yang dimanfaatkan pada penelitian ini dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya lain yang bersifat monumental serta bersedia di lokasi penelitian.

Teknik analisis data (kualitatif) pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pola berpikir induktif. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, yaitu mengkaji fakta-fakta empiris mengenai pelaksanaan program MBG pada SPPG Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari, kemudian dianalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah* dalam hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, sekaligus pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Data yang didapatkan melalui wawancara, pengamatan, serta dokumentasi, analisis dilaksanakan dengan sistematis untuk mengidentifikasi dampak program terhadap peningkatan perekonomian lokal masyarakat. Selanjutnya, temuan tersebut dikaji berdasarkan prinsip-prinsip *masalah mursalah* untuk menilai sejauh mana program MBG memenuhi unsur kemaslahatan, terlebih pada aspek menjaga harta (*hifz al-mal*). Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

Reduksi Data (*Data Reduction*) tahapan yang berorientasi pada penyeleksian, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang bersumber dari wawancara, pengamatan, serta dokumentasi sebagai reduksi data. Pada fase ini, data yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, yakni pelaksanaan program MBG, dan dampaknya terhadap perekonomian lokal, serta kesesuaiannya dengan prinsip *masalah mursalah*, sedangkan data yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian dieliminasi agar proses analisis menjadi lebih terarah serta mendalam.

Penyajian Data (*Data Display*) dilaksanakan berbentuk uraian naratif, tabel, serta matriks analisis yang dibentuk dengan sistematis. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah peneliti memahami pola, keterkaitan, serta kecenderungan yang timbul dari data di lapangan. Penyajian data juga dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah* untuk melihat sejauh mana program MBG memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan peningkatan perekonomian lokal.

Penarikan Kesimpulan serta Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) tahapan ini merupakan proses pengambilan makna serta kesimpulan yang mengacu akan data yang sudah dilaksanakan reduksi serta ditampilkan. Kesimpulan tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan diverifikasi secara berulang melalui pengecekan data lapangan dan kesesuaian dengan teori yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, kesimpulan diarahkan untuk menilai apakah pelaksanaan program MBG di SPPG Desa Bumiharjo telah memenuhi prinsip *masalah mursalah* serta berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian lokal.

Pada penelitian ini, teknik penjaminan kevalidan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data serta melaksanakan pengecekan kembali derajat kepercayaan sebuah informasi yang didapatkan serta instrumen yang berbeda pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Dalam konteks penelitian ini, data mengenai implementasi program MBG serta dampaknya terhadap ekonomi lokal di SPPG Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari diperoleh dari berbagai sumber, seperti kepala SPPG, Asisten Lapangan SPPG, UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Informasi yang diperoleh dari masing-masing sumber tersebut kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk melihat kesesuaian, perbedaan, maupun penguatan data. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan silang antara hasil wawancara dengan dokumen resmi serta hasil observasi lapangan. Dengan demikian, triangulasi sumber dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan, sehingga analisis *masalah mursalah* terhadap program MBG dapat disusun secara objektif serta bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil SPPG Desa Bumiharjo

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari berlokasi di Jl. Harjo Sudarmo/Rt 12 Rw 03, Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. SPPG Bumiharjo merupakan salah satu unit dapur sehat atau dapur umum yang dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah dan kelompok rentan. SPPG Bumiharjo memiliki peran penting dalam memproduksi, mengelola, serta mendistribusikan makanan sehat, higienis, dan bergizi seimbang kepada para penerima manfaat. Sasaran program meliputi siswa-siswi jenjang SD, SMP/MTs, SMA/SMK, balita, ibu hamil, serta masyarakat yang terdaftar melalui layanan Posyandu. Dalam pelaksanaannya, SPPG Bumiharjo tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga memperhatikan standar keamanan pangan, kebersihan lingkungan dapur, serta kandungan gizi pada setiap menu yang disajikan.

Kegiatan operasional di SPPG Bumiharjo dilakukan secara terstruktur mulai dari proses pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Bahan makanan yang digunakan sebagian besar berasal dari hasil pertanian dan produk lokal masyarakat sekitar sehingga turut mendukung pemberdayaan ekonomi warga desa. Selain itu, menu makanan disusun dengan memperhatikan kebutuhan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Dalam menjalankan tugasnya, SPPG Bumiharjo melibatkan tenaga kerja lokal yang terdiri dari juru masak, petugas distribusi, petugas kebersihan, dan tim pengawas gizi. Kehadiran SPPG ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan lapangan pekerjaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan dan kesehatan. Pelaksanaan program juga dilakukan dengan pengawasan ketat dari pihak terkait guna memastikan makanan yang diberikan layak konsumsi, aman, dan memenuhi standar kesehatan.

SPPG Bumiharjo di Kecamatan Batanghari mendapatkan perhatian dan sorotan positif di tingkat daerah maupun nasional karena dinilai berhasil menjadi salah satu contoh implementasi Program MBG yang inovatif dan efektif. Pada Agustus 2025, SPPG Bumiharjo menerima kunjungan dari pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Kapolres Lampung Timur, untuk meninjau langsung proses operasional serta efektivitas pelaksanaan program. Kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap pengelolaan SPPG yang dinilai tertib, bersih, dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Keberadaan SPPG Bumiharjo diharapkan dapat menjadi model pengembangan dapur sehat berbasis masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berharap angka kekurangan gizi dan stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang lebih sehat, aktif, dan produktif di masa mendatang.

Penerapan Program MBG di SPPG Desa Bumiharjo

Program MBG di Desa Bumiharjo dijalankan oleh SPPG sebagai unit pelaksana yang bertanggung jawab atas tersedianya serta distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Pada implementasinya, SPPG tidak hanya mengelola proses pengolahan dan penyaluran makanan, tetapi juga melakukan pengadaan bahan pangan dengan melibatkan pelaku UMKM lokal. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pemasokan bahan pangan secara rutin yang kemudian diolah oleh tim dapur SPPG

menjadi menu makanan bergizi sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara jumlah penerima manfaat program MBG melalui SPPG Desa Bumiharjo tercatat sebanyak 3.259 orang.

Distribusi Pemasok UMKM dalam Program MBG

No	Alamat UMKM	Jumlah UMKM
1.	Bumiharjo	6
2.	Banjarejo	4
3.	Metro	1
4.	Pekalongan	1
	Jumlah	12

Berdasarkan tabel distribusi pemasok UMKM, diketahui bahwa terdapat 12 pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk operasional SPPG Desa Bumiharjo. sebagian besar pemasok bahan pangan berasal dari Desa Bumiharjo, dan diikuti oleh pemasok dari wilayah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program MBG melibatkan masyarakat lokal maupun masyarakat dari wilayah sekitar dalam rantai penyediaan bahan pangan. Keterlibatan tersebut dilakukan bertujuan untuk pelaksanaan MBG tidak hanya memberikan manfaat pada aspek pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak kepada ekonomi masyarakat lokal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengambilan bahan pangan dilakukan dari UMKM Desa maupun desa sekitar. Menurut Bapak NAW selaku Kepala SPPG Bumiharjo. Ia mengungkapkan sebagai berikut:

“kami berusaha mengambil bahan pangan dari UMKM sekitar, ya harapannya agar program ini dapat membantu roda perekonomian masyarakat.”(NAW, 2026).”

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Raihan et al., 2026) yang menyatakan bahwa program MBG mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatann permintaan bahan pangan dan keterlibatan UMKM lokal. Selain itu penelitian lain yang telah dilakukan oleh (Yuni, 2025) menjelaskan bahwa program MBG juga berpotensi memperkuat UMKM pangan karena adanya kebutuhan bahan pangan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Selanjutnya penelitan (Mursalin et al., 2026) mengungkapkan bahwa implementasi program MBG dapat menciptakan *multiplier effect* ekonomi melalui adanya peningkatan keterlibatan antara petani, pedagang, dan UMKM dalam rantai distribusi pangan. Penelitian (Basit & Ramadani, 2025) juga memperlihatkan bahwa program MBG mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan komoditas pangan masyarakat.

Dalam penelitian ini hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan program MBG bukan sekedar berperan dalam meningkatkan pencukupan gizi masyarakat, melainkan turut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Keterlibatan 12 UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan memperlihatkan program ini menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat serta mendorong perputaran barang dan jasa di tingkat lokal.

Dampak MBG Terhadap Perekonomian Lokal

Pelaksanaan program MBG di SPPG Desa Bumiharjo memerlukan pengadaan berbagai bahan pangan untuk mendukung operasional dapur setiap hari. Berdasarkan hasil observasi, dapur SPPG secara rutin menyediakan bahan pangan seperti beras, daging, telur,

sayuran, tempe, buah-buahan, serta bumbu dapur yang digunakan dalam penyusunan menu makanan bagi para penerima manfaat program.

Pengadaan bahan pangan pada tanggal 15 januari 2026

Keterangan	Nilai
Total pengadaan bahan pangan	Rp.39.398.000
Jenis bahan pangan	Beras, daging, sayuran, telur, tempe, buah, kue basah dan bumbu dapur
Tujuan Penggunaan	Kebutuhan operasional dapur SPPG

Berdasarkan tabel pengadaan bahan pangan menunjukkan bahwa nilai total pembelian bahan pangan dalam satu kali transaksi mencapai Rp39.398.000. Nilai tersebut memperlihatkan pelaksanaan program MBG menciptakan permintaan bahan pangan dengan jumlah yang relatif besar di tingkat lokal. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong aktivitas ekonomi antara pihak pengelola SPPG dengan para pemasok bahan pangan yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan operasional dapur.

Besarnya nilai pengadaan ini, program MBG memiliki peran signifikan dalam menciptakan permintaan pasar terhadap produk UMKM lokal. Setiap transaksi yang dilakukan oleh SPPG secara langsung menjadi sumber pendapatan bagi para pemasok bahan pangan, sehingga mendorong terjadinya perputaran ekonomi di tingkat lokal. Jika pengadaan ini dilakukan secara berkelanjutan, maka akumulasi nilai transaksi dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AP selaku UMKM pemasok beras, informan menyampaikan bahwa setelah bekerja sama dengan SPPG terjadi peningkatan permintaan beras dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya dipasarkan kepada pedagang dan masyarakat sekitar. Ia mengungkapkan sebagai berikut:

“Sebelum bekerja sama dengan SPPG penjualan saya biasanya hanya pedagang pasar dan masyarakat sekitar. Kemudian setelah menjadi pemasok untuk MBG permintaan beras meningkat (AP, 2026).”

Selain itu hasil wawancara dengan Ibu SM selaku UMKM pemasok kue basah, menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi hingga 80% setelah menjadi pemasok rutin dari program MBG. Kondisi tersebut memberikan dampak positif kepada keberlangsungan dan perkembangan usaha UMKM lokal. Ia mengungkapkan sebagai berikut:

“Setelah bekerja sama dengan SPPG, saya mengalami peningkatan pembuatan kue basah hingga 80%, yang tadinya hanya melayani pesanan sekarang menjadi pemasok rutin (SM, 2026).”

Selain itu hasil wawancara Bapak JE selaku UMKM pemasok buah dan sayuran menunjukkan bahwa program MBG memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian lokal seperti yang dijelaskan yaitu sebagai berikut:

“Sebelum bekerja sama dengan SPPG, hasil sayuran biasanya hanya dijual di pasar sekitar dan terkadang tidak habis terjual, namun setelah menjadi pemasok MBG permintaan sayuran menjadi lebih rutin setiap minggu (JE,2026).”

Dilanjut dengan Bapak JE juga menjelaskan bahwa dengan adanya kerja sama SPPG yang memberikan kepastian pasar, para petani lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan jumlah produksi sayuran. Ia mengungkapkan sebagai berikut:

“Setelah bekerja sama dengan SPPG, kami menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan jumlah produksi sayuran karena permintaan dari program MBG dilakukan secara rutin setiap minggu. Sebelumnya hasil panen terkadang sulit terjual dalam jumlah besar, namun sekarang ada kepastian pasar sehingga kami lebih semangat menanam dan menjaga kualitas hasil panen agar tetap sesuai kebutuhan SPPG (JE,2026).”

Hasil wawancara lainnya dengan Bapak R selaku UMKM pemasok telur ayam juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha setelah bekerja sama dengan program MBG. Ia menyampaikan sebagai berikut:

“Setelah menjadi pemasok tetap SPPG, permintaan telur meningkat sehingga produksi peternakan juga ikut bertambah dibanding sebelumnya (R,2026).”

Selain itu, wawancara dengan Bapak B selaku UMKM pemasok tempe memperlihatkan bahwa program MBG membantu menciptakan pemasaran yang lebih stabil. Ia menyampaikan bahwa:

“Biasanya penjualan tempe hanya untuk pasar sekitar desa, namun setelah bekerja sama dengan SPPG produksi menjadi lebih rutin karena permintaan dilakukan setiap hari (B,2026).”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program ini berpengaruh terhadap permintaan produk UMKM Lokal. Untuk melihat dampak ekonomi program MBG terhadap pelaku usaha lokal, penelitian ini menampilkan data perubahan omzet dan keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan pada operasional SPPG Desa Bumiharjo.

Tabel Omzet Sebelum dan Sesudah MBG dihitung dalam satu kali transaksi

No	Jenis UMKM	Omzet Sebelum MBG	Omzet Sesudah MBG	Keterangan
1.	Pemasok Beras	Rp1.250.000- Rp1.500.000	Rp3.114.000	Permintaan meningkat setelah menjadi pemasok tetap
2.	Pemasok Kue Basah	Rp.180.000	Rp.640.000	Menjadi pemasok rutin SPPG
3.	Pemasok Sayuran	Rp.500.000	Rp.1.200.000	Hasil panen lebih mudah dipasarkan
4.	Pemasok Telur Ayam	Rp.2.500.000	Rp.5.382.000	Permintaan telur bertambah
5.	Pemasok Tempe	Rp.800.000	Rp.2.085.000	Permintaan dilakukan setiap hari

Berdasarkan tabel perubahan omzet UMKM, terlihat bahwa pelaksanaan program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Sebagian besar pelaku UMKM mengalami peningkatan permintaan produk setelah bekerja sama dengan SPPG sebagai pemasok bahan pangan. Peningkatan tersebut terlihat pada pemasok beras, kue basah, sayuran, telur ayam, dan tempe yang mengalami peningkatan produksi serta pemasaran yang lebih stabil dibandingkan sebelum adanya program MBG. Selain meningkatkan omzet usaha, program MBG juga memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMKM dan petani lokal melalui permintaan bahan pangan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal serta memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat sekitar.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa program MBG memiliki potensi untuk mendorong perputaran ekonomi tingkat lokal melalui keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Keterlibatan ini menyatakan bahwa program ini tidak hanya memberikan peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adanya permintaan bahan pangan yang dilakukan secara rutin memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMKM dan petani lokal, sehingga dengan adanya program ini maka mendorong peningkatan produksi, keberlangsungan usaha, dan stabilitas pendapatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Program MBG memiliki dampak yang positif terhadap keberlanjutan penguatan ekonomi masyarakat sekitar.

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam perspektif ekonomi Islam, suatu kebijakan publik dapat dinilai membawa kemaslahatan apabila memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan sejumlah prinsip syariah. Konsep *masalah mursalah* menekankan bahwa kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat luas bisa berperan menjadi landasan pertimbangan diambilnya kebijakan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Prinsip-prinsip syariah yang tersusun dalam *maqasid syariah* dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pencapaian kesejahteraan. Inti dari adanya prinsip *maqasid syariah* adalah untuk kemaslahatan umat demi mencapai falah (bahagia dunia akhirat), karena tujuan penetapan hukum dalam islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara (Haslinah et al., 2019).

Pelaksanaan program MBG dapat dipahami sebagai kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat karena bukan memfokuskan akan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, melainkan turut memberikan dampak akan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan bagi dapur SPPG memperlihatkan adanya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan aktivitas usaha dan pendapatan.

Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan menciptakan pasar yang relatif stabil bagi para pemasok lokal. Kondisi tersebut berdampak positif bagi pendapatan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut juga berkaitan dengan konsep *hifz al-mal* (menjaga harta) pada *maqashid syariah* yang menitikberatkan pada urgensi memelihara serta mengembangkan sumber daya ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DK selaku Asisten Lapangan SPPG, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan usaha masyarakat sekitar. Ia menyampaikan bahwa sebagai berikut:

“Ya, di SPPG kami berupaya melibatkan masyarakat lokal agar manfaat program dapat dirasakan secara ekonomi oleh warga sekitar (DK,2026).”

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa implementasi program MBG mengandung nilai kemaslahatan yang sejalan dengan konsep *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*. Maka dari itu, program MBG di Desa Bumiharjo dapat dipahami sebagai kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Program MBG tidak hanya memberikan pencukupan akan kebutuhan gizi masyarakat, melainkan juga peningkatan bagi aktivitas perekonomian masyarakat lokal. Keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan serta meningkatnya permintaan terhadap komoditas bahan pangan memperlihatkan bahwa program ini memiliki potensi untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Adapun hasil terkait ketiga kriteria *masalah mursalah* sebagai berikut:

1. Kriteria *Masalah Mursalah* Terhadap program MBG

Berdasarkan hasil penelitian di SPPG Desa Bumiharjo, pelaksanaan program MBG dapat dianalisis menggunakan kriteria *masalah mursalah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu harus bersifat nyata (*haqiqi*), bersifat umum (*ammah*), dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Pertama, *masalah mursalah* harus bersifat nyata (*haqiqi*). Dalam penelitian ini, manfaat program MBG terbukti secara empiris melalui peningkatan pendapatan pelaku UMKM lokal. Data menunjukkan bahwa setelah bekerja sama dengan SPPG, terjadi peningkatan omzet yang signifikan, seperti pada pemasok beras yang mengalami kenaikan pendapatan dari sekitar Rp.1.500.000 menjadi Rp.3.114.000 satu kali transaksi. Selain itu, adanya pengadaan bahan pangan dengan nilai mencapai Rp39.398.000 dalam satu kali transaksi menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang nyata dan terukur. Hal ini menegaskan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan bukan bersifat asumsi, melainkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kedua, *masalah mursalah* harus bersifat umum (*ammah*), yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Program MBG tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima makanan bergizi, tetapi juga kepada pelaku UMKM, petani, dan pemasok bahan pangan yang terlibat dalam rantai distribusi. Keterlibatan 12 UMKM dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa dampak ekonomi program ini tidak terbatas pada individu tertentu, melainkan menyebar secara luas dalam masyarakat. Dengan demikian, program MBG memenuhi unsur kemaslahatan umum karena mampu mendorong perputaran ekonomi lokal secara kolektif.

Ketiga, *masalah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Program MBG merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis, bahkan sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-ma*). Program ini mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, meningkatkan pendapatan, serta menjaga keberlangsungan usaha masyarakat. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program MBG di SPPG Desa Bumiharjo telah memenuhi unsur *masalah mursalah*, karena memberikan manfaat yang nyata, bersifat luas, dan tetap berada dalam koridor syariat Islam.

2. Keterbatasan Dalam Penerapan *Masalah Mursalah*

Meskipun pelaksanaan program MBG di SPPG Desa Bumiharjo telah menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian lokal, namun masih terdapat

beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal, terlihat dari masih adanya pengadaan bahan pangan dari luar desa, seperti beras yang dipasok dari Desa Banjarejo. Berdasarkan data, dari total 12 UMKM yang terlibat, hanya 6 UMKM yang berasal dari Desa Bumiharjo, sementara sisanya berasal dari wilayah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi program belum sepenuhnya terfokus pada masyarakat lokal Bumiharjo.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun program MBG telah menciptakan perputaran ekonomi, namun tingkat kemaslahatan yang dihasilkan masih dapat ditingkatkan, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi lokal secara lebih merata. Dalam perspektif *masalah mursalah*, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan yang bersifat umum (*ammah*) secara optimal, karena manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha di desa setempat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kebijakan dalam memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal agar kemaslahatan yang dihasilkan dapat lebih luas, merata, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bumiharjo tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas perekonomian lokal. Keterlibatan 12 pelaku UMKM sebagai pemasok bahan pangan menunjukkan bahwa program MBG menciptakan perputaran ekonomi melalui peningkatan permintaan bahan pangan, terbentuknya kepastian pasar, serta meningkatnya aktivitas produksi dan pendapatan pelaku usaha lokal.

Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, implementasi program MBG telah memenuhi unsur kemaslahatan karena memberikan manfaat yang nyata (*haqiqi*), menjangkau kepentingan masyarakat secara luas (*ammah*), dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa program sosial berbasis pangan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat dari aspek pemenuhan gizi, tetapi juga memperkuat keberlangsungan ekonomi lokal melalui prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta).

Meskipun demikian, pemanfaatan potensi ekonomi lokal masih belum optimal karena sebagian pengadaan bahan pangan masih berasal dari luar Desa Bumiharjo. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengadaan berbasis sumber daya lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis dampak ekonomi MBG menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) agar diperoleh ukuran dampak yang lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, & Abdullah, S. (2022). Maqashid As-Syariah perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah. *Journal of Islamic Studies*, 02(02), 139–159.
- Afdhal. (2023). peran Perempuan dalam Perekonomian Lokal Melalui Ekowisata di Maluku: Tinjauan Sosio-Ekologi dan Sosio-Ekonomi. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(2), 208–224.
- Al-Ghazali, I. (2008). *Al-Mustashfa*. Al-Maktabah Al-Ashriyah - Beirut - Lebanon.
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54.

- Bumiharjo, P. D. (2024). *Profil Desa BumiHarjo* (pp. 1–11). <https://share.google/ksB6alj0p9ey1iG4D>
- Haslinah, Muh, Arafah, Desti, & Miara. (2019). Penerapan Etika Bisnis Dengan Prinsip Maqasid Syariah Pada Usaha Minuman. *Jurnal of Islamic Economic and Business(JIEB)*, 05(01), 94–107.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial - Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 05(1). <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (M. Dr. H. Nurodin Usman, Lc (ed.)).
- Mowilos, R. C., Kaurow, J., Essing, I., Toporundeng, F. O., & Naharia, G. (2025). Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis Literatur. *Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), 1704–1711.
- Mursalin, I. A., Anggrayni, H. F., Viranda, Y. A., Rakhamanto, P. S., Ardhanie, N. D., & Martini, M. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Ekonomi Lokal Inklusif di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 24(1), 93–112. <https://doi.org/10.26623/slsi.v24i1.13399>
- Pendidikan, D. I. S. (2024). *Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG)*.
- Raihan, A. H., Izzatunnisa, A., Israh, M. W., Cipta, M., Muhajir, R. M. A., & Alya, P. P. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pendorong dan Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(April), 95–112.
- Sofyan, A., & Yusuf, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2538–2548.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Waluyo, S. D. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis : Tinjauan Ekonomi Politik Dalam Kejehateraan Dan Ketahanna Pangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 144–151.
- Yadiman, H. (2025). *Kajian Program MBG (Makan Bergizi Gratis)*.
- Yanti, N. (2025.). *Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam*. 312–326.
- Yosef, P. K., Djefrianto, N., & Misbahudin, D. (2025). Kontribusi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Ekonomi Lokal Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, 2(November), 110–118.
- Yuni, N. (2025). Peluang Program Makan Bergizi dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pangan Dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan. *Journal Of Finance, Business and Economics*, 3(2), 24–42).